



**RILIS KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025
KE SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 06 – 10 DESEMBER 2024**

Pemerintah dan stakeholder terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BMKG dan BNPP/Basarnas, BUMN bidang Transportasi, serta Badan Usaha Jalan Tol diminta melakukan koordinasi dan persiapan yang mantap dilapangan dalam rangka mendukung operasi angkutan transportasi pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (NATARU). Hal ini ditekankan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI dalam acara Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jawa Timur, tanggal 06 s/d 10 Desember 2024.

Menurut hasil survey Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat secara nasional periode NATARU 2024/2025 adalah sebesar 110,67 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 281,60 juta, dengan Daerah Tujuan tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur sekitar 15,78%. Sementara itu, pilihan moda tertinggi adalah Mobil sebesar 36,07%, Sepeda Motor sebesar 17,71%, Bus sebesar 15,04%, Kereta Api Antar Kota 12,85%, dan Pesawat 8,85%.

Selain itu, jika dibandingkan dengan angkutan NATARU periode 2023/2024 di Provinsi Jawa Timur terjadi lonjakan penumpang yang signifikan, khususnya di Bandara Internasional Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak. Data menunjukkan bahwa lonjakan penumpang di Bandara Juanda pada Nataru periode 2023/2024 sebanyak 636.044 penumpang atau naik 12,48% dari periode sebelumnya yaitu 565.466 penumpang. Sedangkan untuk Pelabuhan Tanjung Perak pada Nataru 2023/2024 mencapai 109 ribu penumpang, naik 27% dari periode sebelumnya yaitu 79 ribu penumpang.

Melihat data-data di atas, Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan stakeholder terkait untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik lagi di sektor transportasi udara, laut, darat, dan kereta api. Pemerintah harus dapat mengurai permasalahan-permasalahan yang menonjol dari operasi Nataru periode yang lalu, khususnya terkait antisipasi kemacetan di jalan dan lokasi wisata, kecelakaan lalu lintas, pemenuhan SPM Jalan Tol dan Jalan Nasional, *law enforcement* terhadap truk ODOL, pengawasan atas fluktuasi harga tiket, *delay management* dan *on time performance* moda transportasi, prediksi cuaca yang akurat, dan upaya meningkatkan *response time* saat kecelakaan dan bencana alam.

Selain itu, pada kesempatan Kunjungan Kerja ini, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pemetaan lokasi rawan bencana dan kepadatan kendaraan, menyiapkan Posko Alat Berat/ *Disaster Relief Unit* (DRU) serta bahan material yang tersebar di Provinsi Jawa Timur. “Kita mengharapkan agar permasalahan maupun masukan yang telah disampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses ini menjadi perhatian serius Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam operasi NATARU 2024/2025 di Provinsi Jawa Timur”, tegas Ketua Tim Kunjungan Kerja Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si.

Tim Kunker Reses Surabaya